



**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

# Mitigasi Risiko Permasalahan Hukum dalam pengadaan

Oleh:

Ikak G Patriastomo

Deputi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, LKPP

Bogor, 26 September 2019



**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

## Pengadaan dan Perencanaan Kegiatan



Risiko Permasalahan Hukum:

- 1. ADMINISTRASI**
- 2. PERDATA**
- 3. PIDANA**



**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

## Risiko administrasi



- Kebutuhan
- Program
- Anggaran
- Rencana Pelaksanaan
- Rencana Pengadaan

- Potensi Penyedia
- Supply Demand
- Jadwal Pemilihan
- Persyaratan Penyedia

- Kontrak
- Pengendalian
- Addendum
- Pengakhiran kontrak

Tidak tepat mengambil keputusan



**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

## Risiko Perdata



- Kebutuhan
- Program
- Anggaran
- Rencana Pelaksanaan
- Rencana Pengadaan

- Potensi Penyedia
- Supply Demand
- Jadwal Pemilihan
- Persyaratan Penyedia

- Kontrak
- Pengendalian
- Addendum
- Pengakhiran kontrak

Kontrak tidak mencapai tujuan dan sengketa kontrak



**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

## Risiko Pidana



- Kebutuhan
- Program
- Anggaran
- Rencana Pelaksanaan
- Rencana Pengadaan

- Potensi Penyedia
- Supply Demand
- Jadwal Pemilihan
- Persyaratan Penyedia

- Kontrak
- Pengendalian
- Addendum
- Pengakhiran kontrak

Niat jahat di setiap tahapan, suap, pemalsuan, gratifikasi, kerugian negara



**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

## Risiko Tipikor dalam pengadaan

**Perencanaan  
Kebutuhan s/d  
Pengadaan**

- Kebutuhan tidak ada dasarnya/fiktif
- Anggaran dibuat mark-up
- Rencana pelaksanaan diarahkan
- Rencana pengadaan direkayasa agar memenangkan satu pelaku usaha



**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

## Risiko Tipikor dalam pengadaan

- Pengumuman tidak terbuka
- Penyedia dibuat tunggal
- Jadwal pemilihan sangat terbatas
- Persyaratan penyedia berlebihan

**Pemilihan  
penyedia**



**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

## Risiko Tipikor dalam pengadaan

- Kontrak lemah dan cenderung merugikan pengguna
- Tidak terjadi pengendalian kontrak yang efektif
- Addendum tidak memiliki dasar kuat dan merugikan pengguna
- Pengakhiran kontrak tidak dapat dilakukan walaupun wan prestasi
- Serah terima tidak sesuai kontrak

**Pengendalian  
kontrak/  
pelaksanaan**





**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

## Mitigasi Risiko pengadaan



- Kebutuhan
- Program
- Anggaran
- Rencana Pelaksanaan
- Rencana Pengadaan

- Potensi Penyedia
- Supply Demand
- Jadwal Pemilihan
- Persyaratan Penyedia

- Kontrak
- Pengendalian
- Addendum
- Pengakhiran kontrak

**Dokumentasikan dengan cermat setiap pengambilan keputusan di setiap tahapan pengadaan.**



**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/jasa Pemerintah



Ikak G. Patriastomo

Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah, LKPP

08164844375

[ikak@lkpp.go.id](mailto:ikak@lkpp.go.id)

<https://konsultasi.lkpp.go.id/>